



**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN
EFEKTIVITAS PAD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR UNTUK PERIODE
ANGGARAN 2012-2017**

SKRIPSI

Diajukan oleh:
Gradiana Mei Taek
022115110

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

NOVEMBER 2019

ABSTRAK

Gradiana Mei Taek, NPM 022115110, Fakultas Ekonomi, Akuntansi Sektor Publik. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2012-2017. Ernadhi Sudarmanto, AK., M.M., M.Ak., CFE, CfrA., CA., QIA. Dan Dessy Herlisnawati, S.E., M. Si.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pemerintah Daerah Kota Bogor merupakan salah satu wilayah administrasi di provinsi Jawa sebagai pemerintah daerah yang memiliki berbagai fenomena dan permasalahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah yaitu kemandirian keuangan dan efektivitas PAD.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: (1) untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017. (2) untuk menganalisis pengaruh efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017. (3) Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017

Variabel Rasio Kemandirian (RK) memiliki nilai hitung sebesar 4,568 dengan taraf signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan melebihi nilai t-tabel sebesar 2,447. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($4,568 > 2,447$) yang memiliki arti bahwa Rasio Kemandirian secara signifikan mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_1 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

Variabel Rasio Efektivitas (RE) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,400 dengan taraf signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,447. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($5,400 < 2,447$) yang memiliki arti bahwa Rasio Efektivitas Kota Bogor berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_2 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

Hasil penghitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 5,437 dengan taraf signifikansi sebesar 0,041, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 5,14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F-hitung $>$ F-tabel ($5,437 > 5,14$) yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian (RK) dan variabel Rasio Efektivitas (RE) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK) di Kota Bogor.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD.

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN
EFEKTIVITAS PAD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH BOGA BOGOR UNTUK PERIODE
ANGGARAN 2012-2017**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dosen Fakultas Ekonomi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN
EFEKTIVITAS PAD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR UNTUK PERIODE
ANGGARAN 2012-2017**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Sabtu, Tanggal: 02 /November /2019

Gradiana Mei Taek
022115110

Menyetujui,

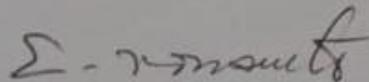
Ketua Sidang



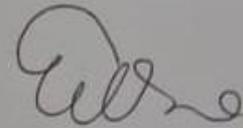
(Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA))

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



(Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM., MAk., CFE.,
CFrA., CA., QIA)



(Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si)

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topik dalam penulisan skripsi ini adalah adalah **“Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Periode Anggaran 2012-2017”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat banyak bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulsi selama menyusun skripsi.
2. Kedua orang tua penulis yang selalu selalu memberikan doa, memberikan motivasi, memberikan nasihat, dukungan materil, perhatian dan kasih sayang yang tidak terhingga.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., CSEP.,QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. CMA., CAPM. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Ernadhi Sudarmanto, AK., M.M., M.Ak., CFE, CfrA., CA., QIA selaku Ketua Komisi Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak bimbingan serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan baik.
7. Ibu Dessy Herlisnawati,S.E.,M.Si. selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian proposal penelitian ini.
8. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
9. Kepada teman-teman kelas C Akuntansi 2015 yang telah memberikan warna selama perkuliahan, semangat, keceriaan dan bantuan ketika penulis sedang kesulitan.
10. Kepada teman-teman kelas konsenterasi Akuntansi Sektor Publik 2015 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

11. Kepada sahabat-sahabat,Aghnie,Ria,Dila,Cici dan yang selalu memberikan banyak perhatian, semangat, motivasi dan banyak kata yang tak bisa penulis utarakan melalui kalimat ini.
12. Kepada Om Tante, Ka Ida, Ka Niko,Ka Vincen,Ka Lince,Ka Toni, K Ino,Memik,Rio,Itha Charien dan Ka Loys yang selalu membantu dan memberikan dukungan, semangat dan masukan kepada penulis.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, Oktober 2019
Penulis,

Gradiana Mei Taek

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HAK CIPTA	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritik.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktik.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.....	7
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan.....	10
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.2 Kemandirian Keuangan Daerah.....	11
2.2.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah	11
2.2.2 Rasio Kemandirian Kuangan Daerah	12
2.2.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah	13
2.2.4 Faktor-Fakto yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah	14
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	14
2.3.2 Sumber Pendapata Asli Daerah	16
2.3.3 Tujuan Dan Fungsi Pendpatan Asli Darah	18
2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	19
2.4.1 Penelitian Sebelumnya	19
2.4.2 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4.2.1 Pengaruh Kemnadirian Keungan Daerah terhadap Kinerja	23

	2.4.2.2 Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan.....	23
	2.4.2.3 Kemandirian Keuangan Daerah dan pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan.....	24
	2.5 Hipotesis Penelitian	25
	2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	16
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	26
	3.1 Jenis Penelitian	26
	3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	26
	3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
	3.4 Operasionalisasi Variabel	26
	3.5 Metode Penarikan Sampel	28
	3.6 Metode Pengumpulan Data	28
	3.7 Metode Analisis Data	28
	3.7.1 Analisis Deskriptif	29
	3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	29
	1. Uji Normalitas	29
	2. Uji Multikolinieritas.....	30
	3. Multi Heteroskedastisitas	30
	4. Uji Autokorelasi.....	30
	3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda	31
	3.7.4 Uji Hipotesis	31
	1. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t).....	31
	2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	32
	3. Koefisien Determinasi (R^2).....	32
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
	4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
	4.1.1 Sejarah Kota Bogor	35
	4.1.2 Visi dan Misi Kota Bogor.....	35
	4.1.3 Letak Geografis Kota Bogor.....	36
	4.2 Analisis Variabel	36
	4.2.1 Analisi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor	36
	4.2.2 Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Bogor.....	39
	4.2.3 Analisis Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor	41
	4.3 Analisis Variabel Data	43
	4.3.1 Analisis Statistika Deskriptif	43
	4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	45

4.3.2.1 Uji Normalitas	46
4.3.2.2 Uji Multikolonieritas	47
4.3.2.3 Uji Autokorelasi	48
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
4. 3.4 Pengujian Hipotesis.....	50
4.3.4.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji Statistik t).....	50
4.3.4.2 Pengujian Hipotesis Simultan(Uji Statistik F)	51
4.3.4.3 Pengujian Hipotesisi Pengujian Koefisien Determinasi.....	51
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian	52
4.4.1 Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor	53
4.4.2 Pengaruh efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017.	53
4.4.3 Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Kemandirian Keuangan Efektivitas PAD Kinerja Keuangan Tahun 2010-2017.....	3
Tabel 2.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	13
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	27
Tabel 4.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017	27
Tabel 4.2	Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2012-2017	37
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017	39
Tabel 4.4	Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	40
Tabel 4.5	Kinerja Keuangan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017	42
Tabel 4.6	Hasil Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.8	Hasil Uji Parsial(T).....	48
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi Darbin-Watson.....	48
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	49
Tabel 4.11	Hasil Uji Ragresi Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.12	Hasil Uji Simultan(F).....	51
Tabel 4.13	Uji Determinasi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis Rasio Kemandirian Keuannngan Efektivitas PAD dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.....	3
Gambar 2.1	Krangka Pemikiran	25
Gambar 4.1	Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017.....	37
Gambar4.2	Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017.....	38
Gambar 4.3	Grafik Target dan Realisasi PAD Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017.....	50
Gambar 4.4	Grafik Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017	41
Gambar 4.5	Grafik Rasio Kinerja Keuangan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kepada publik.

Halim (2013) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kuncoro (2012) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2012: 169). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2013:128), yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis *shift*), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis *share*).

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana

Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2013:233).

Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Peningkatan cakupan PAD dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah.

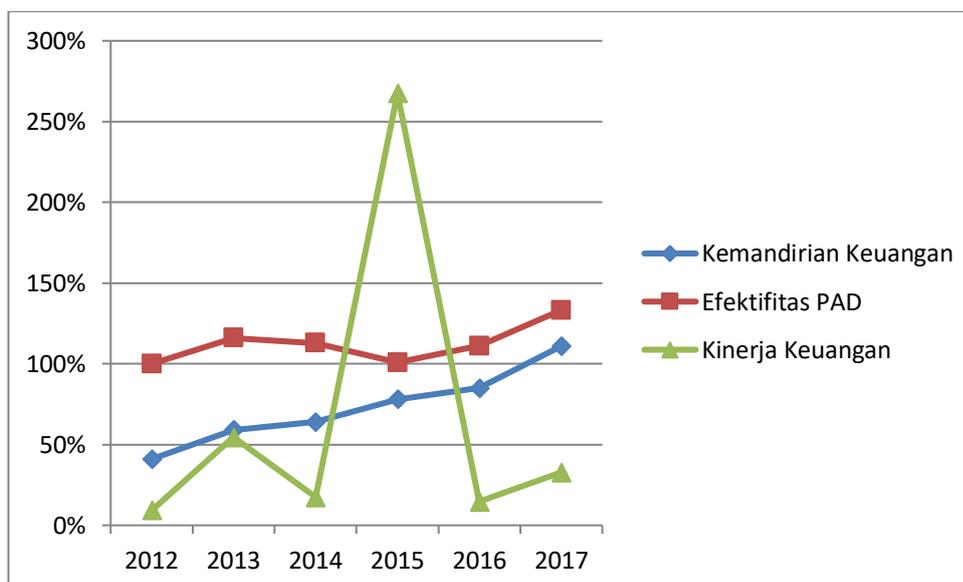
Menurut E.Koswara (2000) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Pemerintah Daerah Kota Bogor merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Jawa Barat sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki berbagai fenomena dan permasalahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu masalah yang timbul adalah kinerja keuangan daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang merupakan masalah yang sangat rumit terutama di era otonomi saat ini.

Berikut ini akan penulis uraikan hasil Rasio Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, dan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2012-2017.

Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, dan Kinerja Keuangan
Tahun Anggaran 2012-2017

N		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	KEMANDIRIAN KEUANGAN						
	Pendapatan Asli Daerah	300,932,470,2 10,000	464,695,880, 485	544,835,708,2 54	2,002,209,819 ,261	2,292,175,674,8 01	3,041,872,447 ,905
	Bantuan Pemerintah Pusat	741,642,341,9 88	792,975,350, 762	855,645,928,0 15	2,583,489,732 ,475	2,692,167,023,1 39	2,742,839,370 ,823
	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	41	59	64	78	85	111
2.	EFEKTIVITAS PAD						
	Realisasi PAD	300,932,470,2 10,000	464,695,880, 485	544,835,708,2 54	2,002,209,819 ,261	2,292,175,674,8 01	3,041,872,447 ,905
	Target PAD	355,456,245,8 45	400,676,068, 667	483,014,420,7 04	1,986,241,742 ,426	2,065,822,879,0 00	2,282,578,507 ,000
	Rasi efektifitas PAD	85	116	113	101	111	133
3.	Pertumbuhan PAD						
	Realisasi PAD	300,932,470,2 10	464,695,880, 485	544,835,708,2 54	2,002,209,819 ,261	2,292,175,674,8 01	3,041,872,447 ,905
	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	9	54	17	267	14	33



Gambar 1.1

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, dan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2012-2017

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan:

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan hal ini juga berdampak pada pertumbuhan PAD yang mengalami penurunan, namun pendapatan asli daerah pada tahun 2015 yang mengalami

penurunan namun pertumbuhan PAD pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat.

2. Dana transfer pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar -37,17%. Hal ini menunjukkan semakin rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahono (2018) yang berjudul Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera menunjukkan variable Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Lain-lain pendapatan yang Sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, koefisien determinasi disesuaikan (*AdjustedR2*) 0,629943 atau 62,99 persen, berarti masih ada 38,00,% variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Pengujian dilakukan terhadap 212 Kabupaten/Kota di pulau Sumatera, adapun jumlah data yang dijadikan sampel 198 sedangkan 14 sisanya merupakan data yang tidak lengkap atau belum dipublikasikan. Analisis data dilakukan dengan analisis data panel dan pengolahan data penelitian dengan menggunakan alat uji statistik *Eviews 9*.

Selanjutnya penelitian Siti Yulianah (2017) dengan judul Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014 menunjukkan bahwa dari 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pengaruh positif signifikan, sedangkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data panel dan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Penelitian ini bertujuan untuk

melihat pengaruh dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010-2014.

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Dwirandra (2006) tentang efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kemandirian sebagai alat analisis. Kabupaten/Kota di Bali dalam periode tersebut masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif. Rasio efektivitas keuangan berkisar dari 75,01% sampai dengan di atas 100%. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Bali dalam periode dua tahun terakhir masuk dalam kategori

kemandirian keuangan yang sedang (rasio Kemampuan Keuangan Daerah lebih dari 50% sampai dengan 75%) dan rendah (rasio Kemampuan Keuangan Daerah lebih dari 25% sampai dengan 50%).

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif pada Kabupaten Bogor berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Periode Anggaran 2012-2017”**.

1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh efektifitas PAD terhadap kinerja keuangan PADA Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017?
3. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017?

1.2.2 Identifikasi Masalah

Berikut ini merupakan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan namun pertumbuhan PAD pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan PAD yang mengalami penurunan.
2. Dana transfer pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berpengaruh

3 . terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar - 37,17%.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh efektifitas PAD terhadap kinerja keuangan PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua golongan baik secara teoritis dan praktik seperti berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritik

Penelitian ini berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam menggambarkan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan aplikasi, khususnya mengenai analisis apakah kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2013-2017.

1.4.2 Kegunaan Praktik

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah .

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah

3. Bagi Akademis

Memberikan hasil pemikiran serta tambahan ilmu pengetahuan di bidang perekonomian Kota Bogor khususnya pada tingkat efektivitas, kemandirian dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Kinerja adalah prestasi yang mencapai apa yang direncanakan, baik oleh individu maupun oleh organisasi. Sederhananya, kinerja seseorang atau organisasi akan baik jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Jika kinerjanya melebihi target, dikatakan kinerjanya sangat bagus, sedangkan jika lebih rendah dari target, bisa dikatakan kinerjanya buruk.

Menurut Bastian (2014: 274), kinerja adalah deskripsi tentang bagaimana mencapai suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja adalah kinerja yang telah dicapai organisasi dalam periode waktu tertentu. Ketika mengukur keberhasilan / kegagalan suatu organisasi, semua kegiatan organisasi harus dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input program, tetapi juga pada keunggulan output program.

Kinerja keuangan adalah “tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran” (Haryanto, 2014: 16). Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Menurut Nordiawan (2010: 158), pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk menilai apakah program / kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan yang lebih penting, apakah keberhasilan difokuskan pada perencanaan yang sudah ditargetkan.

Menurut Syamsi dalam Herisistam (2015:33) kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Agustina dalam Pramita (2015:9) kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2013). Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tentu.

Perkembangan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Halim, 2013):

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan
4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2013:98):

1. Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar,

yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah mengenai pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan dan kemandirian daerah (Yuliati, 2011: 124).

2.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan penilaian kinerja di sektor publik menurut Halim (2013:158) antara lain:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang harus lebih baik daripada sekarang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem *reward*, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.
5. Memotivasi pegawai
Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*.
6. Menciptakan akuntabilitas publik
Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah

daerah sendiri (Hirawan, 1999: 26). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 2011: 99).

1. Kemampuan struktural organisasinya.
Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah
Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan keuangan daerah
Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

2.1.3 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Wahyuni (2008:4), Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Artinya, tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam

ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut dilibatkan pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan (Stakeholders).

2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, pertanggungjawaban publik dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diaudit, baik oleh internal auditor, yaitu inspektorat maupun oleh eksternal auditor, yaitu BPK-RI di daerah.
3. Nilai uang (value for money), yaitu penerapan 3(tiga) prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 - a. Ekonomi; pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Artinya, barang dan jasa dibeli dengan mengeluarkan sejumlah dana harus sesuai dengan kualitasnya.
 - b. Efisiensi; suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan dana yang ada.
 - c. Efektivitas; hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Artinya, hasil yang dicapai harus sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang dikorbankannya.

2.2 Kemandirian Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Halim (2008:232) adalah “kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui kemandirian yang dilakukan daerah dengan mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi yang serta diharapkan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, semua daerah dalam melakukan urusan daerah baik itu urusan pemerintahan maupun urusan dalam pembangunan dapat mengadakan keuangan daerah masing-masing yaitu pendapatan

asli daerah (PAD). Hal ini seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa indikator untuk mewujudkan kemandirian daerah diukur melalui PAD.

2.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data eksternal). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. PAD sebagai salah satu penerimaan yang daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	26% - 50%	Konsultatif
Sedang	51% - 75%	Partisipatif
Tinggi	76% - 100%	Delegatif

Dari table 2.3 di atas, tingkat kemampuan dan pola hubungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal berikut:

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat relatif sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim 2011 :168) mengemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

1. Pola Hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola Hubungan Konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola Hubungan Delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam

melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah Pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

2.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD (indikator kemandirian keuangan daerah) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah,
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah,
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah,
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Tangkilisan (2007:89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi
3. atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber -sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18). Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Pasal 6 ayat 1). PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah.

Menurut Halim (2013:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Yani (2009:51), pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.”

Menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari semua penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah dan sumber lainnya yang

dimiliki oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pelayanan masyarakat.

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (EKD) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah menurut Mahmudi (2016: 142):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a) Hasil Pajak Daerah
 - b) Hasil Retribusi Daerah
 - c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim 2013;101).
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari:
 - a) Sumbangan dari pemerintah,
 - b) Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,
 - c) Pendapatan lain-lain yang sah.

Kelompok pendapatan asli daerah menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

Pajak ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parker, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB (Halim 2013;102).

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (benefit principles). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga

mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2013:104) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menurut Darise (2009:72) antara lain sebagai berikut: 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan

asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan

kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah (Mamesa 1995 dalam Damang 2011).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Mamesa 1995 dalam Damang 2011).

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini penggunaan beberapa pustaka adalah untuk mendukung objektivitas penulisan dan juga sebagai pembanding untuk terjadinya kesamaan objek penelitian, dalam penelitian ini ada beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai relevansi diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dori Saputra (2014) yang berjudul “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat”. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) Trend kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4) Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Wijayanti (2017) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian dilakukan uji hipotesis dengan metode regresi linear berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, dana bagi hasil,

3. dana alokasi umum, derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

Penelitian yang dilakukan oleh Wahono (2018) yang berjudul Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera. Analisis data dilakukan dengan analisis data panel dan pengolahan data penelitian dengan menggunakan alat uji statistic *Eviews 9*. Peneliti menyimpulkan bahwa variable Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Lain-lain pendapatan yang Sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, koefisien determinasi disesuaikan (*AdjustedR2*) 0,629943 atau 62,99 persen, berarti masih ada 38,00,% variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulianah (2017) yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pengaruh positif signifikan, sedangkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data panel dan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pengaruh positif signifikan, sedangkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektifitas terhadap Kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006-2010”. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka akan disajikan dalam tabel mengenai hasil penelitian terdahulu analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD terhadap kinerja keuangan, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Dokumentasi Penelitian
1	Dori Saputra (2014)	Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian - Efektivitas Keuangan Daerah 	<p>Hasil penelitian menunjukkan : 1) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) Trend kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4) Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011</p>	Skripsi Universitas Negeri Padang
2	Yuni Wijayanti (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)	Regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - Kinerja Keuangan Daerah T - Alokasi Belanja Modal 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, dana bagi hasil, dana alokasi umum, derajat desentralisasi, dan rasio efektivitas tidak</p>	Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

					berpengaruh terhadap alokasi belanja modal	
				-		
3	Wahono (2018)	Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera	Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Kinerja Keuangan 	<p>Peneliti menyimpulkan bahwa variable Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Lain-lain pendapatan yang Sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, koefisien determinasi disesuaikan (<i>AdjustedR2</i>) 0,629943 atau 62,99 persen, berarti masih ada 38,00,% variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini</p>	Skripsi Universitas Lampung

4	Siti Yulianah (2017)	Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014	Deskriptif Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas Pendapatan Asli Daerah - Efisiensi Keuangan Daerah - Kemandirian Keuangan Daerah - Pertumbuhan Ekonomi 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 26 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat memiliki Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pengaruh positif signifikan, sedangkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
5	Sri Widada (2012)	Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektifitas terhadap Kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006-2010.	Deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian - Efektifitas - Kinerja Keuangan 	Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultan	Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta

2.4.2 Kerangka Pemikiran

2.4.2.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim dan Kusufi, 2013).

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer). Semakin mandiri suatu daerah otonom, maka daerah tersebut

semakin mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerahnya masing-masing, yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

2.4.2.2 Pengaruh Efektifitas PAD terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar Pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati et al., 2012)

Saragih (2003) menjelaskan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Meningkatnya jumlah PAD dan kualitas layanan mencerminkan kinerja keuangan dan kinerja manajerial yang baik (Wenny, 2012).

Penelitian Wenny (2012) menyatakan bahwa PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitu pula dengan hasil penelitian Rustiyaningsih (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda. Diperkuat dengan hasil penelitian Sunaryo (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Peningkatan pendapatan daerah akan menambah kekayaan daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kualitas layanan publik yang baik mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, Lain-lain PAD yang bukan pajak dan retribusi yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya dari Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan

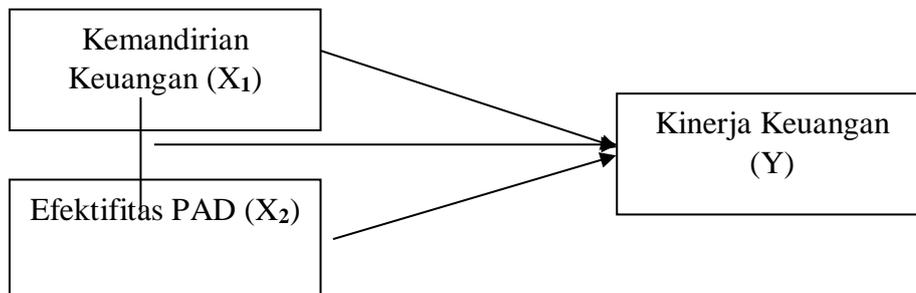
Umum dan Dinas LLAJ dan penerimaan lain-lain yaitu hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa dan giro-giro lain.

2.4.2.3 Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kinerja Keuangan

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2013:233).

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya yang disajikan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2013: 67) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya”.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka secara hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

- H₁ : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Periode Anggaran 2012-2017
- H₂ : Efektifitas PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Periode Anggaran 2012-2017
- H₃ : Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Periode Anggaran 2012-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif berupa non-studi kasus mengenai pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017, yang menjelaskan dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fakta dan fenomena yang diamati secara sistematis dan actual serta akurat. Dalam penelitian ini akan terlihat apakah kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiono (2010) dinyatakan bahwa “objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal (variabel tertentu)”. Objek penelitian merupakan keseluruhan badan/elemen yang akan diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan diteliti kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD sebagai variabel independen kinerja keuangan sebagai variabel dependen.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah geografis regional, maksud dari geografis regional yang diteliti adalah daerah, sehingga data yang diperoleh adalah mengenai atau berasal dari respon suatu daerah tertentu. Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik (Siregar, 2013: 17).

Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari data sekunder yaitu riset dengan mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota bogor, laporan pertanggungjawaban walikota bogor dan ringkasan APBD Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017 yang dipaparkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel ke dalam 2 kelompok yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel bebas/tidak terkait)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan dan efektifitas PAD meliputi :

- a. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Halim (2008:232) adalah “kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

b. Efektifitas PAD

Menurut Halim (2013:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah “tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran” (Haryanto, 2014: 16).

Untuk lebih jelasnya kedua variabel tersebut dapat dituangkan pada tabel berikut

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Kemandirian Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$	Rasio
Efektifitas PAD	Rasio Efektifitas PAD	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja keuangan	Rasio Kinerja keuangan	$\frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Mahmudi (2016: 140-141)

3.5 Metode Penarikan Sampel

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2014: 117). “Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti” (Arikunto, 2013: 131).

Penelitian ini menggunakan sampel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2012-2017 yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id. Adapun teknik yang digunakan adalah *non probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sujarweni, 2014: 71). Pendekatan yang digunakan

dalam penarikan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu (Sujarweni, 2014: 72).

Pertimbangan pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bogor
2. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian
3. Laporan keuangan lima tahun terakhir akan memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD, dan kinerja keuangan sehingga dapat terlihat pertumbuhan dari masing-masing variabel tersebut.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data sekunder yaitu data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor. Lampiran pertanggungjawaban Walikota Bogor, dan Ringkasan APBD Kota Bogor periode 2013-2017 yang didapatkan dari website www.djpk.depkeu.go.id.

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Untuk Periode Anggaran 2012-2017. Untuk itu akan digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sebelum analisis ini dilaksanakan, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang sah. Nilai tersebut akan terpenuhi jika hasil uji asumsi klasiknya memenuhi asumsi normalitas, serta tidak terjadi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Dalam melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan, peneliti melakukan perhitungan, pengolahan, dan penganalisaan dengan bantuan dari program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 23.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum (Ghozali, 2009:19). *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (1997) persamaan yang diperoleh dari sebuah estimasi dapat dioperasikan secara statistik jika memenuhi asumsi klasik, yaitu memenuhi asumsi bebas multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Pengujian ini dilakukan agar mendapatkan model persamaan regresi yang baik dan benar-benar mampu

memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai kaidah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Pengujian ini dilakukan dengan bantuan *software* SPSS. Uji klasik ini dapat dikatakan sebagai kriteria ekonometrika untuk melihat apakah hasil estimasi memenuhi dasar linier klasik atau tidak. Setelah data dipastikan bebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka dilanjutkan dengan uji hipotesis yakni uji individual (uji t), pengujian secara serentak (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak dimana model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk melihat distribusi normal adalah dengan melihat *normal probability* plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2009).

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal grafik, maka hal ini ditunjukkan pada distribusi normal sehingga model persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal grafik maka hal ini tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga persamaan regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas dapat juga dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan melihat tingkat signifikansinya. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. Pendeteksian normalitas data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji KolmogorovSmirnov. Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2009). Multikolinieritas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai VIF > 10 mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas, sedangkan untuk nilai *tolerance* $< 0,1$ (10%) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

Jika VIF > 10 atau jika *tolerance* $< 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika VIF < 10 atau jika *tolerance* $> 0,1$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel tidak bebas (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residualnya (Y prediksi - Y sesungguhnya).

Dasar analisisnya sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (DW test). Uji Durbin-watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis Regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Model persamaan regresi linier berganda yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Kinerja Keuangan Daerah
X ₁	= Kemandirian Keuangan Daerah
X ₂	= Efektifitas PAD
A	= Konstanta

3.7.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol) (Ghozali, 2009).

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS 23. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Kemudian untuk menguji signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen digunakan uji signifikan simultan (Uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2009). Jika *probability* F lebih kecil dari 0,05 maka H₁, H₂, dan H₃ diterima, sedangkan jika lebih besar 0,05 maka H₁, H₂, dan H₃ ditolak.

Jika hasil uji F menunjukkan hasil yang signifikan, maka model regresi bisa digunakan untuk prediksi/pengujian secara parsial (individu), sebaliknya jika hasil menunjukkan non/tidak signifikan, maka model regresi tidak bisa digunakan untuk prediksi/pengujian secara pasial (individu) Sugiono (2010).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Pada intinya, koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil R^2 mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun jika hasil R^2 mendekati 0 berarti terdapat korelasi yang lemah antara variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2009).

Dalam kenyataan R^2 dapat bernilai negatif, walaupun dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Ghozali (2009) jika dalam empiris didapatkan nilai R^2 negatif, maka nilai Adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$ maka Adjusted $R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$ maka Adjusted $R^2 = (1-k)/(n-k)$, jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kota Bogor periode 014. Pemerintah Kota yang menjadi sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam BAB III Pemerintah Daerah Kota Bogor merupakan salah satu di Indonesia yang tepatnya terletak di wilayah Jawa Barat. Secara geografis Bogor terletak diantara 106' 48' Bujur Timur dan 6 26 Lintang Selatan, luas lavah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian secara administratif Kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa vanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 63 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Dermaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26' C dengan suhu terendah 21,8' C dengan suhu tertinggi 30,4' C. Kelembaban udara 70%, curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 - 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

4.1.1. Sejarah Kota Bogor

Hampir secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat dalam berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari sumber-sumber tersebut berdasarkan urutan waktu:

Naskah Carita Waruga Guru (1750-an). Dalam naskah berbahasa Sunda Kuna ini diterangkan bahwa nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon Pakujajar. K.F. Holle (1869). Dalam tulisan berjudul De Batoe Toelis te Buitenzorg (Batutulis di Bogor), Holle menyebutkan bahwa di dekat Kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi menurut Holle, nama Pakuan ada

kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar ("op rijen staande pakoe bomen").

G.P. Rouffaer (1919) dalam *Encyclopedie van Nederlandsch Indie* edisi Stibbe tahun 1919. Pakuan mengandung pengertian "paku", akan tetapi harus diartikan "paku jagat" (spijker der wereld) yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. "Pakuan" menurut Fouffaer setara dengan "Maharaja". Kata "Pajajaran" diartikan sebagai "berdiri sejajar" atau "imbangan" (evenknie). Yang dimaksudkan Rouffaer adalah berdiri sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Rouffaer tidak merangkumkan arti Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran menurut pendapatnya berarti "Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan (Maharaja) Majapahit". Ia sependapat dengan Hoesein Djajaningrat (1913) bahwa Pakuan Pajajaran didirikan tahun 1433.

R. Ng. Poerbatjaraka (1921). Dalam tulisan *De Batoe-Toelis bij Buitenzorg* (Batutulis dekat Bogor) ia menjelaskan bahwa kata "Pakuan" mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno "pakwan" yang kemudian dieja "pakwan" (satu "w", ini tertulis pada Prasasti Batutulis). Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan "pakuan". Kata "pakwan" berarti kemah atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti "istana yang berjajar" (aanrijen staande hoven).

H. Ten Dam (1957). Sebagai Insinyur Pertanian, Ten Dam ingin meneliti kehidupan sosial-ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam tulisannya, *Verkenningen Rondom Padjadjaran* (Pengenalan sekitar Pajajaran), pengertian "Pakuan" ada hubungannya dengan "lingga" (tonggak) batu yang terpancang di sebelah prasasti Batutulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam *Carita Parahyangan* disebut-sebut tokoh Sang Haluwesi dan Sang Susuktunggal yang dianggapnya masih mempunyai pengertian "paku".

Ia berpendapat bahwa "pakuan" bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibukota (hoffstad) yang harus dibedakan dari keraton. Kata "pajajaran" ditinjaunya berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan Kapiten Wikler (1690) yang memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran yang terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tanggerang (disebut juga Ciliwung dan Cisadane). Ten Dam menarik kesimpulan bahwa nama "Pajajaran" muncul karena untuk beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi, Pakuan Pajajaran dalam pengertian Ten Dam adalah Pakuan di Pajajaran atau "Dayeuh Pajajaran". Sebutan "Pakuan", "Pajajaran", dan "Pakuan Pajajaran" dapat ditemukan dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 & 2) sedangkan nomor 3 bisa dijumpai pada Prasasti Kebantenan di Bekasi.

Dalam naskah *Carita Parahiyangan* ada kalimat berbunyi "Sang Susuktunggal, inyana nu nyieunna palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran nu mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana pakwan Sanghiyang Sri Ratu Dewata" (Sang Susuktunggal, dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana (untuk) Sri Baduga Maharaja Ratu Penguasa di Pakuan

Pajajaran yang bersemayam di keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu pakuan Sanghiyang Sri Ratu Dewata).

Sanghiyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri Baduga. Jadi yang disebut "pakuan" itu adalah "kadaton" yang bernama Sri Bima dan seterusnya. "Pakuan" adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton atau istana. Jadi tafsiran Poerbatjaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam Carita Parahiyangan, yaitu "istana yang berjajar". Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi bila dilihat nama istana yang cukup panjang tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri sendiri. Diperkirakan ada lima (5) bangunan keraton yang masing-masing bernama: Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam peristilahan klasik "panca persada" (lima keraton). Suradipati adalah nama keraton induk. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, Surasowan di Banten dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya, Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibukota dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya : Nama keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang meluas menjadi nama ibukota dan nama daerah. Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Yogya.

Pendapat Ten Dam (Pakuan = ibukota) benar dalam penggunaan, tetapi salah dari segi semantik. Dalam laporan Tome Pires (1513) disebutkan bahwa bahwa ibukota kerajaan Sunda itu bernama "Dayo" (dayeuh) dan terletak di daerah pegunungan, dua hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa di muara Ciliwung. Nama "Dayo" didengarnya dari penduduk atau pembesar Pelabuhan Kalapa. Jadi jelas, orang Pelabuhan Kalapa menggunakan kata "dayeuh" (bukan "pakuan") bila bermaksud menyebut ibukota. Dalam percakapan sehari-hari, digunakan kata "dayeuh", sedangkan dalam kesusastraan digunakan "pakuan" untuk menyebut ibukota kerajaan. Untuk praktisnya, dalam tulisan berikut digunakan "Pakuan" untuk nama ibukota dan "Pajajaran" untuk nama negara, seperti kebiasaan masyarakat Jawa Barat sekarang ini.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Bogor

Visi Kota Bogor adalah "Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Mad Dan Pemerintahan Amanah". Misi adalah tugas yang diemban Pemerintahan titik berat pada jasa Bogor meliputi:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

4.1.3. Letak Geografis

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106° 48' BT dan 6° 26' LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26° C dengan suhu terendah 21,8° C dengan suhu tertinggi 30,4° C. Kelembaban udara 70 %, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

4.2. Analisis Variabel Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Periode Anggaran 2012-2017 data dan informasi yang diperoleh sebagai berikut :

4.2.1. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio Kemandirian) Pemerintah Daerah Kota Bogor

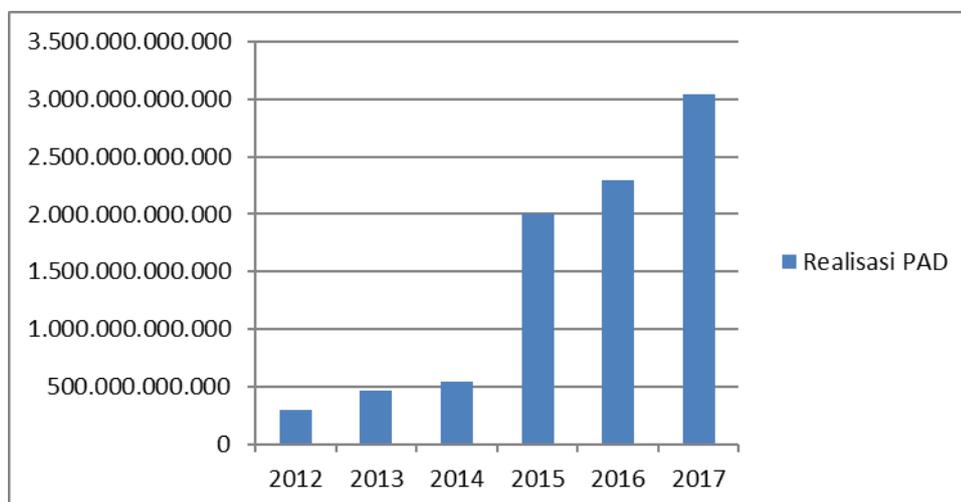
Data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2012 sampai dengan 2017 disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor
Tahun 2012-2017

Tahun	Realisasi PAD	Dana Transfer	Rasio Kemandirian
2012	300,932,470,210	741,642,341,988	41%
2013	464,695,880,485	792,975,350,762	59%
2014	544.835.708.254	855.645.928.015	64%
2015	2.002.209.819.261	2.583.489.732.475	78%
2016	2.292.175.674.801	2.692.167.023.139	85%
2017	3.041.872.447.905	2.742.839.370.823	111%

Sumber: www.djpk.dep.keu.go.id, diolah penulis, 2019

Berikut ini akan disajikan grafik realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bogor untuk tahun anggaran 2012-2017 dalam grafik dibawah ini:



Grafik 4.1. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017

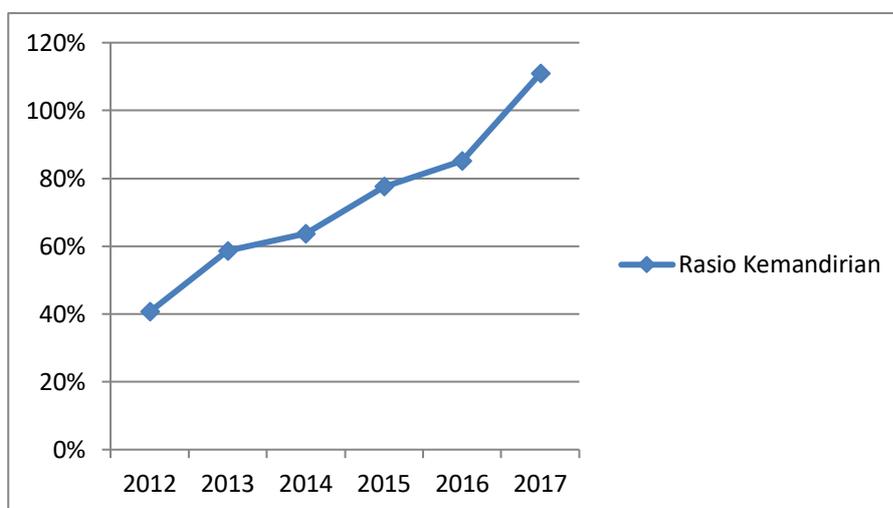
Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat disajikan dalam tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0-25
Rendah	> 25-50
Sedang	> 50-74
Tinggi	> 75 - 100

Sumber, Halim, 2013

Berikut ini akan disajikan grafik rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Bogor untuk tahun anggaran 2012-2017 dalam grafik 4.2. berikut:



Grafik 4.2.

Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012-2017 mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah terendah ada pada tahun anggaran 2012 dengan nilai Rp. 300.932.470.210 dan Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar Rp 3.041.872.447.905, Peningkatan PAD setiap tahunnya juga memberi efek yang positif terhadap tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Bogor.
2. Rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio kemandirian Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kota merupakan rasio kemandirian yang tertinggi dengan nilai 111%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam aspek keuangan sangat baik dikarenakan setiap tahunnya ketergantungan terhadap bantu dari Pemerintah Pusat semakin berkurang tinggal bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bogor terus memaksimalkan setiap potensi penerimaan pendapatan daerah yang ada.

4.2.2. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target pada Laporan Realisasi Anggaran dengan tujuan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100% (seratus persen). Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

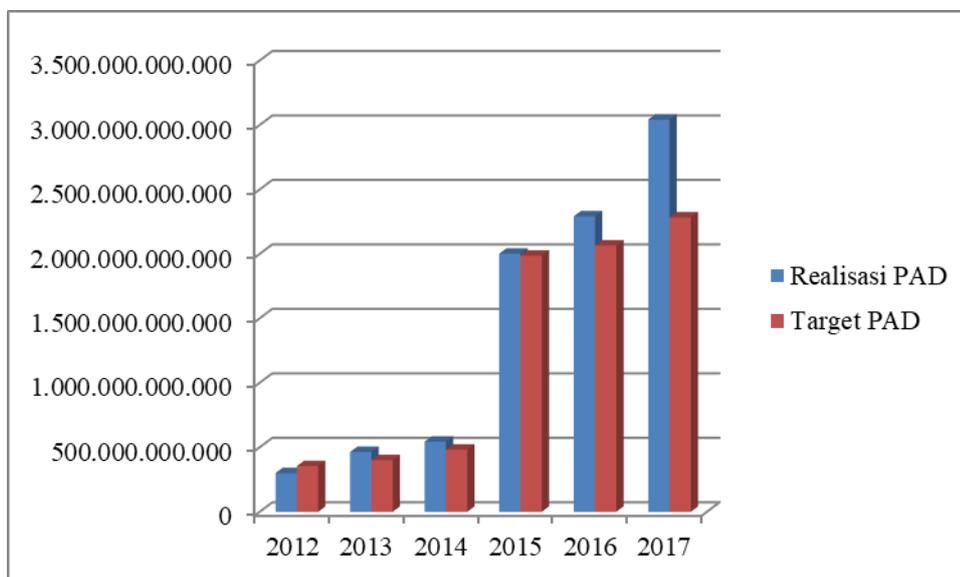
Data realisasi PAD dan target PAD diperoleh dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kota Bogor tahun 2012 sampai tahun 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas PAD
2012	300,932,470,210	355,456,245,845	85%
2013	464,695,880,485	400,676,068,667	116%
2014	544,835,708,254	483,014,420,704	113%
2015	2,002,209,819,261	1,986,241,742,426	101%
2016	2,292,175,674,801	2,065,822,879,000	111%
2017	3,041,872,447,905	2,282,578,507,000	133%

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id. Diolah penulis, 2019.

Berikut ini akan disajikan grafik target dan realisasi pendapatan asli daerah pemerintah kota bogor tahun 2012 sampai tahun 2017 dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 4.3.

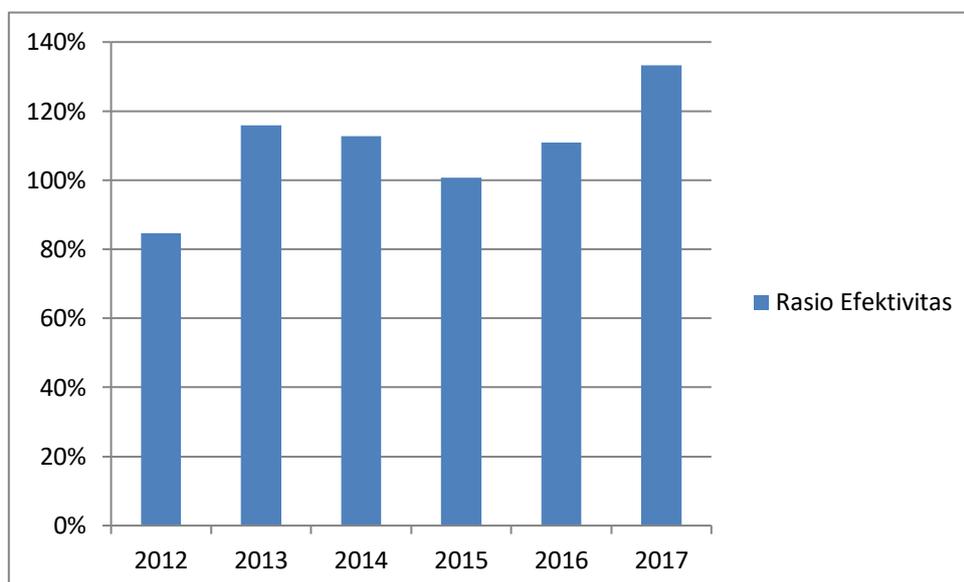
Grafik Target dan Realisasi PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017

Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat disajikan dalam rasio seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektifitas
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90 – 100
Cukup Efektif	> 80 – 90
Kurang Efektif	> 60 – 80
Tidak Efektif	< 60

Berikut ini akan disajikan grafik rasio efektifitas pendapatan asli daerah pemerintah Kota Bogor tahun 2012 sampai tahun 2017 dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 4.4.

Grafik Rasio Efektifitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Tabel 4.4, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2013 –sampai 2017 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selalu melampaui target dan peningkatan realisasinya cukup baik, ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor cukup baik dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang terpungut
2. Realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2012, dikarenakan pada tahun tersebut masih sedikit potensi PAD yang dapat dioptimalkan penerimaan oleh pemerintah Kota Bogor. Realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 2017, dikarenakan pada tahun ini banyak sumber-sumber PAD yang baru restoran-restoran baru dengan adanya pembangunan hotel-hotel dan sehingga menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Bogor.

3. Rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2013-2017 rasio efektivitas PAD diatas 100% dan masuk kriteria sangat efektif, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor cukup baik dalam pemanfaatan sumber-sumber PAD yang ada. Pada tahun 2012 efektivitas PAD berada pada kriteria cukup efektif dikarenakan rasio efektivitas pada tahun tersebut sebesar 85% ini disebabkan karena pada tahun tersebut banyak sumber-sumber penerimaan PAD yang ada tidak terpungut sehingga penerimaan PAD yang ditargetkan tidak tercapai.

4.2.3. Analisis Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjelaskan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib men laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kin keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2013:126). Dalam indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

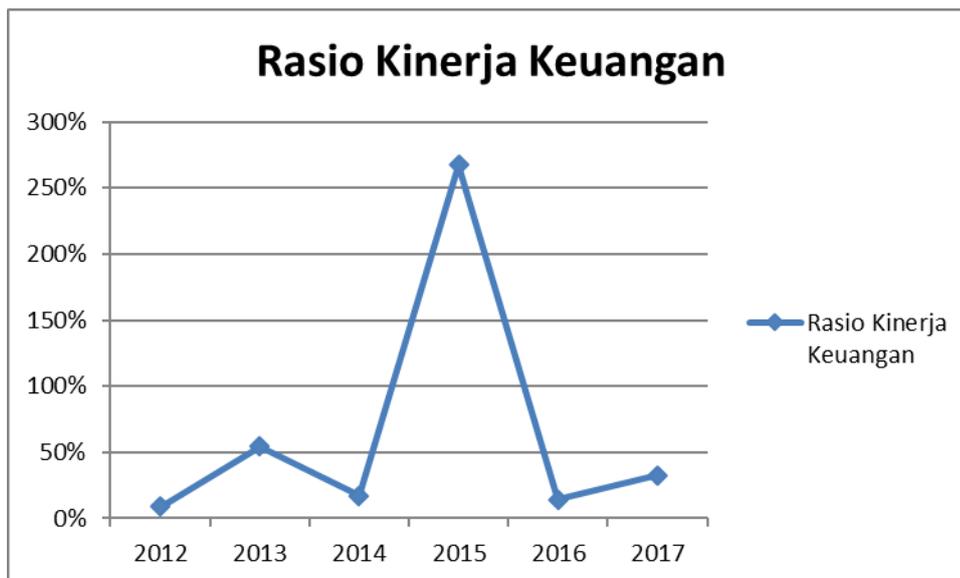
Menurut Ulum (2009:30) rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (*growth ratio*) adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode anggaran. Kinerja keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2012-2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Kinerja Keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Realisasi PAD	Rasio Kinerja Keuangan
2011	275,695,456,512	-
2012	300,932,470,210	9%
2013	464,695,880,485	54%
2014	544,835,708,254	17%
2015	2,002,209,819,261	267%
2016	2,292,175,674,801	14%
2017	3,041,872,447,905	33%

Berikut ini akan disajikan grafik rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Bogor tahun 2012 sampai tahun 2017 dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 4.4 Grafik Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012-2017

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dijelaskan bahwa:

1. Kinerja keuangan Kota Bogor tahun 2012-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar Rp 3.041.872.447.905. dan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah berada pada tahun 2012 sebesar Rp 275.695.456.512.
2. Rasio Pertumbuhan PAD pada tahun 2012 menjadi terendah dibanding tahun-tahun lainnya yaitu sebesar 9%, ini disebabkan karena banyaknya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak terpungut.
3. Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2015 menjadi rasio pertumbuhan PAD yang paling tinggi selama tahun 2012-2017 yaitu sebesar 267% peningkatan rasio pertumbuhan PAD ini terjadi karena pada tahun tersebut banyak hotel-hotel dan restoran-restoran baru yang dibangun dan juga penerimaan dari sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah yang lainnya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdampak sangat baik bagi keuangan daerah maupun kinerja keuangan daerah, karena dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor bisa meningkatkan kemandirian daerah tersebut dan juga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa berkurang. Dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan adanya perbaikan dalam pembangunan dan pengembangan daerah tersebut, khususnya yaitu perbaikan infrastruktur dan juga sarana prasarana yang masih kurang serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan urusan wajib Kota Bogor.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Analisis Deskriptif Statistik

Analisis Statistik deskriptif merupakan analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Pelaksanaan pembangunan di seluruh Pemerintah Daerah Kota Bogor dapat akan berkat adanya dukungan anggaran yang bersumber dari daerah sendiri seperti PAD dan bersumber dari dana perimbangan. Statistik deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2.147). Berikut ini akan disajikan hasil statististik deskriptif dalam Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
RK (X1)	6	.41	1.11	4.38	.7300	.24141
RE (X2)	6	.85	1.33	6.59	1.0983	.16005
KK (Y)	6	.09	2.67	3.94	.6567	.99987
Valid N (listwise)	6					

Sumber : Output SPSS Versi 22

Dari tabel 4.6, dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 6. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif Rasio Kemandirian (RK) Pemerintah Daerah Kota Bogor Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dan sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk Pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Akan tetapi, secara umum untuk Pemerintah besarnya kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD bervariasi sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah.

Dari tabel 5 dapat dilihat, Rasio Kemandirian PAD yang terendah sebesar 0,41 atau 41% pada tahun 2012. Untuk Rasio Kemandirian terbesar yaitu 1.11 atau 111% yang terjadi pada tahun anggaran 2017. Dengan demikian selama periode 2012-2017 rata-

rata Rasio Kemandirian PAD di Bogor adalah sebesar 0.7300 dengan standar deviasi sebesar 0.24141.

Dari penjelasan tersebut, bahwa selama ini Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Bogor setiap tahunnya mengalami peningkatan, Hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peranan yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perbaikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

2. Statistik Deskriptif Rasio Efektivitas PAD (RE) Pemerintah Daerah Kota Bogor Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100% (seratus persen). Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Dari tabel diatas dapat dilihat, Rasio Efektivitas PAD pada Pemerintahan Kota Bogor yang terendah yakni sebesar 0.85 atau 85% terjadi pada tahun 2012. Untuk Rasio Efektivitas PAD terbesar yaitu 1.33 terjadi pada tahun 2017. Dengan demikian selama periode 2012-2017 rata-rata Rasio Efektivitas PAD di Kota Bogor adalah sebesar 1.0983 dengan standar deviasi sebesar 0.16005

Dari penjelasan tersebut, bahwa efektivitas PAD pada Kota Bogor cukup baik dikarenakan rata-rata setiap tahunnya untuk rasio efektivitas PAD antara > 90% 100% dan termasuk kategori efektif.

3. Statistik Deskriptif Kinerja Keuangan (KK) Pemerintah Daerah Kota Bogor Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian Keuangannya.

Dengan mengetahui pertumbuhan pendapatan asli daerah maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlunebdaoat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, semakin besar maka besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik karena model yang baik harus memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Adapun uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah regresi variabel dependen variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan Uji normalitas yang digunakan adalah dengan uji One Sample Kolmogorov Smirnov, apabila nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut ini akan disajikan hasil uji Normalitas Kolmogorov Smimov Test dalam Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		6
Normal Parameters ^a	Mean	1.0983
	Std. Deviation	.24141
Most Extreme Differences	Absolute	.183
	Positive	.183
	Negative	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		.913
Asymp. Sig. (2-tailed)		.376

a Test distribution is Normal.

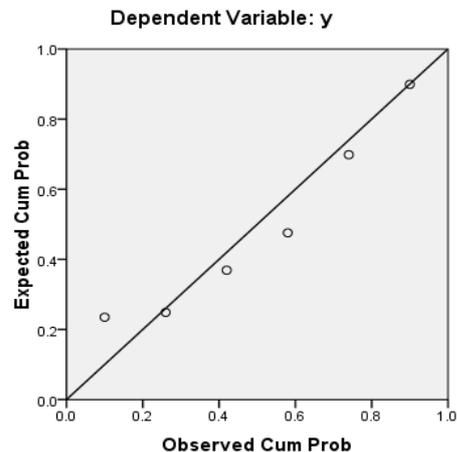
b Calculated from data.

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai signifikasi yang diperoleh Asymp sip (2-tailed) Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan kinerja Keuangan yaitu 0.376. Karena nilai signifikasi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Kinerja Keuangan yang dihasilkan berada di atas 0,05, maka nilai residual tersebut telah berdistribusi normal. Sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi normalitas.

Untuk mempertegas hasil uji normalitas, dapat dilihat dari gambar P Plot seperti dalam Gambar 10 dibawah ini:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Grafik Normalitas Berdasarkan grafik histogram diatas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal. Dan berdasarkan grafik P Plot menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal, karena titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

4.3.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya. variance inflation factor (VIF). Apabila nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance lebih kecil dari 0,01 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Jadi nilai VIF lebih tinggi dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Berikut ini akan disajikan hasil uji Multikolonieritas Variance Inflation Factor dalam Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.610	4.048		.892	.438		
x1	2.991	3.446	.722	4.568	.049	.373	2.682
x2	4.677	5.198	.749	5.400	.035	.373	2.682

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan Tabel 4.8, pada kolom VIF dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk Rasio Kemandirian sebesar 2,682 dan Rasio Efektivitas sebesar 2,682. Nilai VIF variabel independen tersebut yaitu lebih dari 0,1 dan juga nilai tolerance Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas sebesar 0.373 diatas batas minimum yaitu 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas (multicollinearity) diantara variabel bebas.

4.3.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t- (periode sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika dilihat pada statistik Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Berikut ini akan disajikan hasil uji Autokorelasi dalam Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.475 ^a	.226	2.291	1.13587	2.572

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Uji Autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson, DW digunakan untuk Autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercep konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel pengganggu diantara independen (Ghozali, 2016). Singgih (2000), bila angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi Autokorelasi. Berdasarkan Tabel 9. nilai Durbin-Watson 1,0 diantara -2 sampai +2 maka data yang digunakan tidak terjadi autokolerasi.

4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dan semua pengujian memenuhi kriteria BLUE, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian hip untuk analisis regresi berganda.

Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2;$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan (KK)

a = Konstanta

X₁ = Rasio Kemandirian (RK)

X₂ = Rasio Efektivitas (RE)

b₁, b₂ = koefisien regresi

e = Error

Berikut ini akan disajikan hasil uji Regresi Linier Berganda dalam Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.610	4.048		.892	.438		
x1	2.991	3.446	.722	4.568	.049	.373	2.682
x2	4.677	5.198	.749	5.400	.035	.373	2.682

a. Dependent Variable: y

Tabel 4.10, Coefficients di atas bila dilihat pada kolom Unstandardized entns kolom B, persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai *Coefficients kolom berikut*:

$$Y = 3,610 + 2,991RK + 4,677RE$$

Persamaan regresi linier sederhana di atas, mempunyai arti sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,610 menyatakan bahwa jika Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas adalah nol, maka Kinerja Keuangan yang terjadi adalah sebesar 3,610 satuan.
2. Rasio Kemandirian memiliki koefisien bertanda positif sebesar 2,991, artinya bahwa setiap kenaikan Rasio Kemandirian satu satuan maka variabel Kinerja Keuangan (Y) akan naik sebesar 2,991 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Rasio Efektivitas memiliki koefisien bertanda positif sebesar 4,677, artinya bahwa setiap kenaikan Rasio Efektivitas satu satuan maka variabel Kinerja Keuangan (Y) akan naik sebesar 4,677 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Dari hasil regresi di atas tampak bahwa peran Rasio Kemandirian lebih besar dibandingkan dengan peran yang diberikan Rasio Efektivitas terhadap nilai Kinerja

Keuangan. Hal ini dapat diunjukkan dimana nilai koefisien regresi RE > RK yakni $4.677 > 2,911$.

4.3.4. Pengujian Hipotesis

4.3.4.1. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji Statistik t)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen nyai pengaruh secara parsial atau tidak terhadap variabel dependen. Berikut akan disajikan hasil uji Statistik t dalam Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.610	4.048		.892	.438		
RK	2.991	3.446	.722	4.568	.049	.373	2.682
RE	4.677	5.198	.749	5.400	.035	.373	2.682

a. Dependent Variable: KK

Berdasarkan Tabel 4.11 variabel Rasio Kemandirian (RK) memiliki nilai hitung sebesar 4,568 dengan taraf signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan melebihi nilai t-tabel sebesar 2,447. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung > t-tabel ($4,568 > 2447$) yang memiliki arti bahwa Rasio Kemandirian secara signifikan mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_1 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

Sedangkan untuk variabel Rasio Efektivitas (RE) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,400 dengan taraf signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,447. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung > t-tabel ($5,400 < 2,447$) yang memiliki arti bahwa Rasio Efektivitas Kota Bogor berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_2 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

4.3.4.2. Pengujian flipotesis Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA dengan melihat kolom Sig. apabila nilai Sig. < 0,05 maka varia dependen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini akan disajikan hasil uji Statistik F dalam Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.128	2	.564	5.437	.041 ^a
	Residual	3.871	3	1.290		
	Total	4.999	5			

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan Tabel 4.12. menunjukkan hasil penghitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 5,437 dengan taraf signifikansi sebesar 0,041, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 5,14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F-hitung $>$ F-tabel ($5,437 > 5,14$) yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian (RK) dan variabel Rasio Efektivitas (RE) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK) di Kota Bogor.

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima yang dapat dikatakan bahwa variabel Rasio Kemandirian (RK) dan Rasio Efektivitas (RE) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan (KK) di Kota Bogor.

4.3.4.3. Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13
Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.475 ^a	.226	2.291	1.13587	2.572

a. Predictors: (Constant), x2, x1

c. Dependent Variable: y

Berdasarkan Tabel 4.13. Uji Koefisien Determinasi dapat diketahui bahwa koefisien Determinasi R^2 adalah sebesar 0,475 atau 48%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yakni Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas memberikan pengaruh sebesar 48% terhadap Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

4.4. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Efektivitas PAD Terhadap kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor, maka dapat dilakukan interpretasi hasil sebagai berikut:

4.4.1. Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor

Berdasarkan Tabel 4.10 variabel Rasio Kemandirian (RK) memiliki nilai hitung sebesar 4,568 dengan taraf signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan melebihi nilai t-tabel sebesar 2,447. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($4,568 > 2,447$) yang memiliki arti bahwa Rasio Kemandirian secara signifikan mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_1 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi, semakin mandiri suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan daerah tersebut mampu mengelola sumber daya dan potensi-potensi daerahnya secara ekonomis.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan Dwirandra (2006), menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan pemerintah propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD.

Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pada hampir keseluruhan pemerintahan kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD.

Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebenarnya menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Penerimaan yang tinggi dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan pemerintah daerah yakin dapat menggali potensi daerah dengan maksimal sehingga pendapatan pemerintah daerah yang berupa pajak akan meningkat. Namun, dari penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD dengan nilai yang masih rendah, menunjukkan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat kurang yakin dapat menggali potensi daerah, sehingga PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi tidak besar. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah kurang berani dalam menetapkan penerimaan pajak yang tinggi dalam sumber APBD. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak yakin pajak yang diterima oleh daerahnya dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di APBD, sehingga PAD yang dianggarkan rendah.

4.4.2. Pengaruh efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode anggaran 2012-2017

Berdasarkan variabel Rasio Efektivitas (RE) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,400 dengan taraf signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,447. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($5,400 < 2,447$) yang memiliki arti bahwa Rasio Efektivitas Kota Bogor berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_2 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.

Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan mengalami peningkatan. Penelitian ini sama hasilnya dengan landasan teori yaitu semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dori Saputra pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat”. Dalam penelitian Dori Saputra dimana penelitian tersebut mengukur tentang efektivitas keuangan daerah dari tahun 2004-2011 yang memperoleh rata-rata sebesar 109,8 persen yang menandakan berada pada kategori sangat efektif dengan *trend* efektivitas sebesar 116,02 persen yang menandakan cenderung berkembang dari tahun ke tahun karena persentase lebih dari 100 persen.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Oesi Agustuna pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi kasus Kota Malang tahun anggaran 2007-2011”. Dalam penelitian Oesi Agustuna dimana penelitian tersebut mengukur tentang efektivitas keuangan daerah dari tahun 2007-2011 yang memperoleh rata-rata sebesar 105,4 persen yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Andry Haryanto pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis efektivitas, kemandirian, dan desentralisasi pemerintah Kota Medan”.

4.4.3. Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor

Berdasarkan Tabel 4.11. menunjukkan hasil penghitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 5,437 dengan taraf signifikansi sebesar 0,041, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 5,14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F-hitung $>$ F-tabel ($5,437 > 5,14$) yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian (RK) dan variabel Rasio Efektivitas (RE) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK) di Kota Bogor.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Novianto (2016:8) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat berdampak baik bagi keuangan daerah maupun kinerja keuangan daerah, karena dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor bisa meningkatkan kemandirian daerah tersebut dan juga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa berkurang. Dengan meningkatnya Penerimaan Asli Daerah diharapkan adanya perbaikan dalam pembangunan dan pengembangan daerah tersebut, khususnya yaitu perbaikan infrastruktur dan juga sarana prasarana yang masih kurang serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan urusan wajib Kota Bogor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Variabel Rasio Kemandirian (RK) memiliki nilai hitung sebesar 4,568 dengan taraf signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan melebihi nilai t-tabel sebesar 2,447. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($4,568 > 2,447$) yang memiliki arti bahwa Rasio Kemandirian secara signifikan mempengaruhi nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_1 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.
2. Variabel Rasio Efektivitas (RE) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,400 dengan taraf signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (a) sebesar 5% atau sebesar 0,05, dan lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,447. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($5,400 > 2,447$) yang memiliki arti bahwa Rasio Efektivitas Kota Bogor berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Kota Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H_2 diterima, yang dapat dinyatakan bahwa Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap peningkatan nilai Kinerja Keuangan di Kota Bogor.
3. Hasil penghitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 5,437 dengan taraf signifikansi sebesar 0,041, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 5,14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F-hitung $>$ F-tabel ($5,437 > 5,14$) yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel Rasio Kemandirian (RK) dan variabel Rasio Efektivitas (RE) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan (KK) di Kota Bogor.

5.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kota Bogor sebaiknya berkonsentrasi untuk dapat lebih meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak memberatkan iklim usaha di daerah dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyuluhan masyarakat
 - b. Pelayanan terpadu satu atap
 - c. Komputerisasi atau *life skill* di bidang IT ditingkatkan
 - d. Membantu dan meningkatkan fasilitas masyarakat di daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah jangka waktu periode penelitiannya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil satu pemerintah kota saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darise, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Jakarta: Indeks.
- Dwirandra, A.A.N.B.. 2006. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Proponsi Bali Tahun 2002-2006 (Skripsi)*. Universitas Udayana Bali.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrik Dasar*. Erlangga.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat :
- Halim, Abdul, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hirawan, S.B. 1999. *Analisa tentang keuangan daerah Indonesia. Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 34(1), 89-119.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perusahaan Daerah. UU No. 5 Tahun 1962, LN No. 10 Tahun 1962, TLN No. 2387
- Koswara,E, 2000, “Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya”, CSIS XXIX Nomor 1, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat, 2012, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2016.*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN
- Mamesa, DJ. 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi sektor Publik Edisi 2*.Jakarta: Salemba Empat

- Saputra, Dori 2014. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat*. Skripsi Universitas Negeri Padang
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syamsi, Ibnu. 2015. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia.
- UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
- Wahono. 2018. *Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera*
- Wahono. 2018. *Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera*. *Skripsi* Universitas Lampung Bandar Lampung
- Widada, Sri. 2012. *Analisis Pengaruh Kemandirian dan Efektifitas terhadap Kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2006-2010*. *Skripsi* Universitas Negeri Yogyakarta
- Wijayanti, Yuni. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)*. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009
- Yulianah, Siti (2017). *Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap*
- Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Yulianah, Siti 2017. Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gradiana Mei Taek
Alamat : Villa Bogor Indah Blok CC 10 No 5
Tempat dan Tanggal lahir : Oeoan, 18 Mei 1996
Umur : 23
Agama :Katholik

Pendidikan

- SD : SDK Dafalah
- SMP : SMPN 1 Tastim
- SMK : SMAN 1 Atambua
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Oktober 2019

Peneliti,

(Gradiana Mei Taek)

LAMPIRAN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
RK (X1)	6	.41	1.11	4.38	.7300	.24141
RE (X2)	6	.85	1.33	6.59	1.0983	.16005
KK (Y)	6	.09	2.67	3.94	.6567	.99987
Valid N (listwise)	6					

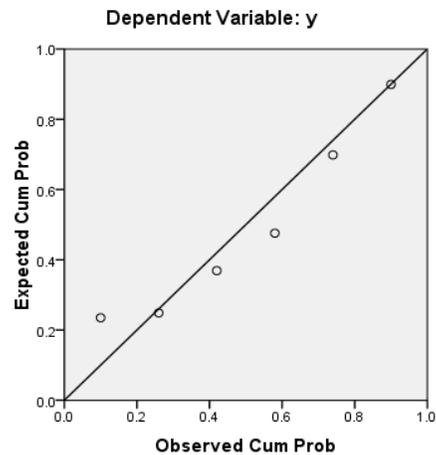
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		6
Normal Parameters ^a	Mean	1.0983
	Std. Deviation	.24141
Most Extreme Differences	Absolute	.183
	Positive	.183
	Negative	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		.913
Asymp. Sig. (2-tailed)		.376

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.610	4.048		.892	.438		
x1	2.991	3.446	.722	4.568	.049	.373	2.682
x2	4.677	5.198	.749	5.400	.035	.373	2.682

a. Dependent Variable: y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.475 ^a	.226	2.291	1.13587	2.572

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.610	4.048		.892	.438		
x1	2.991	3.446	.722	4.568	.049	.373	2.682
x2	4.677	5.198	.749	5.400	.035	.373	2.682

a. Dependent Variable: y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.610	4.048		.892	.438		
RK	2.991	3.446	.722	4.568	.049	.373	2.682
RE	4.677	5.198	.749	5.400	.035	.373	2.682

a. Dependent Variable: KK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.128	2	.564	5.437	.041 ^a
	Residual	3.871	3	1.290		
	Total	4.999	5			

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.475 ^a	.226	2.291	1.13587	2.572

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

